

PENERAPAN STRATEGI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PILKADA SERENTAK DI KOTA MAGELANG

Eko Ari Wibowo

Pascasarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran
ekoari2015@gmail.com

Muradi

Pascasarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Arfin Sudirman

Pascasarjana Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

ABSTRACT

Women voters became one of the strategic voter segments in the political dissemination carried out by the Magelang City KPU because in addition to the population that exceeded male voters, it was also due to obstacles for women in terms of education, economy and social causes which made women more in the domestic area and limited access to information including electoral issues. In the implementation of simultaneous regional elections in 2015, the KPU set a target of national voter participation rate of 77.5%. As an effort to reach the target, Magelang City KPU implemented a strategy in carrying out political socialization to women voters. Qualitative methods are used in this study, and data collection techniques are used through interviews and documentation. Determination of informants is done with the purpose of using the snowball strategy. The results and discussion revealed that the Magelang City Election Commission applied an offensive and defensive strategy simultaneously but with different target groups of women voters.

Keywords: *Strategy, Politics socialization, local election, women*

A. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masuk ke dalam rezim Pemilu sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. KPU Kota Magelang sebagai penyelenggara

Pilkada Kota Magelang merupakan badan penyelenggara Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan seluruh tahapan Pilkada. Salah satu tugas dan wewenang KPU Kota Magelang dalam penyelenggaraan Pilkada adalah melaksanakan sosialisasi politik.

Kota Magelang merupakan salah satu daerah yang ikut dalam pelaksanaan Pilkada serentak pertama di Indonesia tahun 2015 bersama dengan 268 daerah lainnya. Berdasarkan data KPU Kota Magelang, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 89.112 pemilih, yang terdiri dari 42.490 pemilih laki-laki dan 46.622 pemilih perempuan. Artinya jumlah pemilih perempuan di Kota Magelang lebih banyak dari pemilih laki-laki dengan prosentase cukup signifikan yaitu sebesar 52,32%, yang melebihi rata-rata prosentase pemilih perempuan secara nasional pada Pilkada serentak tahun 2015 sebesar 50,10%.¹ Berdasarkan data rekapitulasi perolehan suara Pilkada Kota Magelang tahun 2015 menunjukkan bahwa pencapaian tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 sebesar 77,10%, sedangkan tingkat partisipasi pemilih laki-laki sebesar 73,17%. Jika dibandingkan dengan hasil Pilkada pada periode sebelumnya tahun 2010 maka tingkat partisipasi perempuan di Kota Magelang mengalami kenaikan, dimana tingkat partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada tahun 2010 sebesar 73,70% dan pemilih laki-laki sebesar 69,60%.

Meskipun demikian, pencapaian tingkat partisipasi pemilih perempuan di Kota Magelang pada Pilkada Tahun 2015 masih belum bisa mencapai target partisipasi pemilih nasional sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU sebesar 77,5% yang dituangkan dalam rencana strategis KPU. Padahal jika dilihat dari kondisi geografisnya, Kota Magelang relatif tidak ada hambatan bagi pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), karena luas

¹. KPU. (2016). *Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2015*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.

wilayahnya hanya sekitar 18,12 km² yang terdiri dari 3 Kecamatan, sehingga jarak tempuh menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya relatif dekat. Kemudian secara topografis akses jalan di Kota Magelang juga relatif mudah untuk dilalui oleh pemilih untuk menuju ke TPS, karena wilayahnya berupa dataran dengan kemiringan berkisar antara 5° - 45° dan berada pada ketinggian 380 m di atas permukaan laut, sehingga termasuk daerah yang cukup rata dan bebas banjir.²

Adanya fenomena jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki di Kota Magelang, namun tingkat partisipasi pemilih perempuan di Kota Magelang pada Pilkada tahun 2015 tetap tidak bisa mencapai target sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang strategi sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada tahun 2015. Penelitian tentang strategi politik oleh organisasi penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan sosialisasi politik untuk tujuan peningkatan partisipasi politik masih jarang dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu membahas strategi politik yang dipakai untuk tujuan kemenangan dalam Pemilu oleh para kandidat, tim kemenangan atau partai politik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dipilih karena lebih menekankan pada kedalaman data dan penjelasan, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) dan dokumentasi (*documents*). Sumber data berasal dari data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sosialisasi politik. Dalam penelitian ini pengujian keabsahan data didasarkan pada derajat kebenaran dan kepercayaan data yang diperoleh, dan kesesuaian terhadap

². Badan Pusat Statistik Kota Magelang, (2015) , h 2

peraturan perundangan beserta dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang berwenang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Sosialisasi Politik Kepada Pemilih Perempuan

Pemilih perempuan menjadi salah satu segmen pemilih strategis dalam sosialisasi politik yang dilaksanakan oleh KPU Kota Magelang karena selain populasinya yang banyak melebihi pemilih laki-laki, juga karena adanya hambatan bagi perempuan di Kota Magelang dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial yang menyebabkan perempuan lebih banyak berada dalam wilayah domestik dan terbatasnya akses informasi termasuk tentang Pemilu. Hambatan *pertama* dalam bidang pendidikan yaitu, masih banyaknya perempuan di Kota Magelang yang tidak bisa membaca dan menulis. Perempuan berusia 10 tahun keatas yang tidak bisa membaca dan menulis jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yaitu mencapai 3,22% dari jumlah penduduk, sedangkan laki-laki hanya sebanyak 1,57%. Hal tersebut disebabkan karena penduduk perempuan di Kota Magelang yang berusia 10 tahun keatas tidak bersekolah jumlahnya mencapai 4,07%, sedangkan laki-laki yang tidak bersekolah hanya 0,70% dari jumlah penduduk.³ Rendahnya tingkat pendidikan, kemampuan membaca dan menulis mengakibatkan rendahnya pula pengetahuan serta pemahaman yang dimiliki sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan rendahnya kesadaran sipil dan politik bagi perempuan di Kota Magelang.

Hambatan *kedua* berasal dari bidang ekonomi terkait dengan angkatan kerja atau kesempatan kerja. Jumlah perempuan di Kota Magelang yang bekerja, baik pada sektor jasa, pertanian, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, keuangan dan lainnya hanya sejumlah 35,6% dari seluruh angkatan kerja sebesar

³. Badan Pusat Statistik Kota Magelang, h 9

64.382 jiwa pada tahun 2014.⁴ Artinya banyak perempuan di Kota Magelang yang tidak bekerja atau hanya mengurus rumah tangga, jadi kecenderungan perempuan berperan untuk mengasuh anak dan urusan rumah tangga, seringkali membuat perempuan hanya memiliki sedikit waktu untuk berkegiatan dalam sektor publik. Kemudian hambatan *ketiga* yang berasal dari faktor sosial, dimana banyak pemilih perempuan di Kota Magelang yang tinggal di lingkungan asrama TNI/Polri. Perempuan yang tinggal di lingkungan asrama tersebut pada umumnya memiliki kepala keluarga sebagai anggota TNI/Polri yang tidak memiliki hak politik. Jadi perempuan yang tinggal di lingkungan tersebut jarang mendapatkan informasi seputar politik, sehingga kurang tertarik dengan urusan politik. Perempuan di lingkungan asrama lebih banyak beraktifitas terkait urusan kedinasan dari suaminya. Selain hambatan dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mar'iyah juga terdapat hambatan di bidang politik yang dialami oleh kaum perempuan, yaitu kurangnya sosialisasi politik yang khusus menyasar kaum perempuan dengan mengangkat isu-isu tentang perempuan yang dilakukan oleh partai politik ataupun penyelenggara Pemilu.⁵

Mengatasi berbagai hambatan yang dialami oleh pemilih perempuan di Kota Magelang dalam mengakses dan mendapatkan informasi tentang Pemilu dan tahapan Pilkada Kota Magelang, merupakan tantangan bagi KPU Kota Magelang dalam menjalankan agenda sosialisasi politik pada Pilkada Kota Magelang tahun 2015. Dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik pemilih perempuan. Untuk itu sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang kepada pemilih perempuan penting dilakukan, melalui kegiatan-kegiatan yang familier terhadap perempuan agar hambatan-hambatan bagi pemilih perempuan

⁴. Badan Pusat Statistik Kota Magelang, h 8

⁵. Mar'iyah, C. (2001). Transisi Demokrasi dan Konsolidasi: Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan. *Jurnal Analisis Sosial*, h 15

dalam memperoleh informasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 dapat teratasi.

2. Penerapan Strategi Politik dalam Sosialisasi Pilkada

Penggunaan strategi yang tepat merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh KPU Kota Magelang dalam melaksanakan sosialisasi politik. Strategi sosialisasi politik dalam Pilkada digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik yang mengarah kepada perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik, seperti peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak pilihnya dalam Pilkada. Agar dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Magelang tahun 2015, maka dibutuhkan berbagai usaha, upaya dan tindakan yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang sebagai penyelenggara Pemilu.

Penggunaan strategi yang tepat pada akhirnya akan mengerucut pada kegiatan-kegiatan yang lebih kongkrit, spesifik dan dapat diimplementasikan di lapangan. Tujuan utama dari strategi itu pada prinsipnya adalah pencapaian target. Pada penyelenggaraan Pilkada Tahun 2015 secara serentak, KPU telah menetapkan target prosentase tingkat partisipasi pemilih sebesar 77,5% bagi 269 daerah di seluruh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2015-2019. Keberhasilan terhadap pencapaian tujuan tersebut sangat ditentukan oleh kinerja KPU Kota Magelang sebagai aktor utama penyelenggara Pilkada dalam mensinergikan seluruh potensi yang ada, baik itu menyangkut sumber daya manusia, dana dan dukungan pemangku kepentingan dalam Pilkada. Keterpaduan dan keselarasan dalam mengelola semua elemen tersebut yang tertuang dalam strategi sosialisasi politik KPU Kota Magelang yang kemudian diimplementasikan dalam berbagai kegiatan, agar dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Magelang Tahun 2015.

Pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2010, KPU Kota Magelang dalam melakukan sosialisasi politik belum terfokus kepada kelompok pemilih perempuan

meskipun jumlahnya melebihi setengah dari seluruh jumlah pemilih. Kemudian pada Pilkada tahun 2015 KPU Kota Magelang menetapkan pemilih perempuan sebagai salah satu segmen strategis dalam agenda sosialisasi politik. Banyaknya pemilih perempuan dapat menjadi peluang bagi KPU Kota Magelang untuk meningkatkan prosentase partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2015 dengan cara melakukan sosialisai politik terfokus pada segmen pemilih perempuan, dengan harapan bahwa pemilih perempuan dengan jumlah yang banyak akan mendorong peningkatan prosentase partisipasi pemilih secara signifikan. Namun, dengan banyaknya jumlah pemilih perempuan juga dapat menjadi ancaman, yaitu berupa penurunan prosentase partisipasi pemilih pada Pilkada tahun 2015 apabila pemilih perempuan tersebut banyak yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Untuk itu KPU Kota Magelang menerapkan strategi sosialisasi politik dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada tahun 2015.

KPU Kota Magelang dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi politik kepada pemilih perempuan pada Pilkada tahun 2015 menerapkan dua jenis strategi politik, yaitu strategi *ofensif* (menyerang) dan strategi *defensif* (bertahan) sebagaimana menurut Scroder:

a. *Strategi Ofensif*

Strategi ofensif yang digunakan oleh KPU Kota Magelang dalam sosialisasi politik dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2015. Melalui kegiatan-kegiatan yang familier sesuai dengan karakteristik dan aktifitas kelompok target pemilih perempuan, diharapkan materi sosialisasi politik dapat diterima dengan baik, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kepemiluan dan tahapan Pilkada tahun 2015. Kegiatan tersebut terdiri dari:

1) Kerjasama dengan Organisasi Perempuan

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang untuk mensosialisasikan Pemilu dan tahapan Pilkada tahun 2015 kepada pemilih perempuan melalui pendekatan formal difokuskan pada kegiatan yang

berkaitan dengan aktifitas organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kota Magelang. Untuk menyampaikan informasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 secara lebih tepat dan akurat sebagaimana menurut Scroder dilakukan dengan menggolongkan organisasi-organisasi perempuan tersebut secara lebih spesifik berdasarkan profesi dan agama sebagai berikut:⁶

Pertama, organisasi kekayaan bidang perempuan, KPU Kota Magelang melakukan sosialisasi Pemilu dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 kepada organisasi kekayaan bidang perempuan yang terdaftar di Kota Magelang yang terdiri dari Persit Kodim 0705 dan Bhayangkari Magelang Kota. Kegiatan sosialisasi kepada Persit Kodim 0705 dan Bhayangkari Magelang Kota dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang kepada istri anggota TNI/Polri karena mereka mempunyai kepala keluarga yang secara profesionalisme tidak pernah bersentuhan dengan aktifitas politik.

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang dengan menggandeng organisasi kekayaan bidang perempuan tersebut merupakan salah satu strategi untuk memperluas kelompok target, melalui kegiatan sosialisasi tentang kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Organisasi kekayaan berdasarkan profesi baik yang dibentuk secara formal ataupun informal merupakan saluran penyampaian informasi yang paling jelas, dimana setiap anggota akan mengidentifikasi diri dalam suatu organisasi tersebut dan menjadikan aktifitas-aktifitas organisasi, termasuk kegiatan sosialisasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 sebagai acuan (*reference*) dalam kehidupan politik sebagaimana menurut Mas`oed & MacAndrews.⁷

6. Scroder, P. (2010). *Strategi Politik* (Edisi Cetakan Ketiga ed.). (A. Agoesman, Trans.) Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, h 328

7. Mas`oed, M., & MacAndrews, C. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, h 48

Kedua, organisasi keagamaan bidang perempuan, KPU Kota Magelang melakukan kerjasama dengan pengurus organisasi keagamaan bidang perempuan dalam melaksanakan agenda sosialisasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015. Kerjasama dilakukan dengan melibatkan pengurus organisasi tersebut untuk melaksanakan sosialisasi kepada anggotanya. Pengurus yang ditunjuk mewakili organisasinya kemudian diberikan pembekalan materi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 oleh KPU Kota Magelang. Selain itu KPU Kota Magelang juga memberikan bahan sosialisasi berupa brosur, leaflet, poster, dan sticker sebagai media untuk menyampaikan informasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 kepada anggotanya. Organisasi keagamaan bidang perempuan di Kota Magelang terdiri dari Fatayat NU, Nasyiatul Aisyah, PD. Aisyah, PC. Muslimat NU, dan Gabungan Wanita Gereja Kota Magelang.

Pengurus organisasi keagamaan bidang perempuan yang telah mengikuti kegiatan pembekalan berupa materi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 kemudian melakukan sosialisasi kepada anggotanya. Pengurus organisasi tersebut diberikan keleluasaan dalam menjalankan agenda sosialisasi yang disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dalam kegiatan rutinnnya, seperti mengatur jadwal sosialisasi, tempat sosialisasi dan metode penyampaian informasi yang akan digunakan. Hal tersebut dilakukan agar para anggota organisasi keagamaan bidang perempuan merasa familier atau terbiasa dengan aktifitas yang selama ini sudah dijalankan dalam penyampaian informasi. Dalam organisasi keagamaan bidang perempuan setiap anggota mempunyai ikatan berupa keyakinan yang sama dan sering berinteraksi secara rutin dan bersama-sama, sehingga akan mendorong mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap atau tingkah laku yang dianut oleh organisasi tersebut.⁸ Jadi dengan adanya sosialisasi

⁸. Rush, M., & Althoff, P. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. (K. Kartono, Trans.) Jakarta: Rajawali Pers, h 27

kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 kepada organisasi keagamaan bidang perempuan juga akan mendorong para anggota untuk menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut.

2) Membentuk Relawan Demokrasi Segmen Perempuan

Selain melalui pendekatan formal, upaya pendekatan kepada pemilih perempuan juga dilakukan secara informal melalui sosialisasi politik kepada pemilih perempuan yang tidak menjadi anggota organisasi perempuan, hal tersebut dilakukan dengan strategi membentuk relawan demokrasi segmen perempuan. Relawan demokrasi merupakan gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu. Relawan demokrasi melibatkan peranserta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor demokrasi bagi komunitas atau lingkungannya.⁹ Relawan demokrasi segmen perempuan menjadi mitra KPU Kota Magelang dalam melaksanakan agenda sosialisasi politik yang diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran terhadap pentingnya Pemilu termasuk Pilkada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Relawan demokrasi segmen perempuan selain melakukan sosialisasi politik dengan mendatangi rumah-rumah yang menjadi target sesuai dengan wilayah kerjanya, juga melakukan kegiatan sosialisasi politik secara bersama-sama di keramaian seperti kepada para pedagang pasar tradisional yang ada di Kota Magelang, yang terdiri dari pasar Rejowinangun, pasar Kebonpolo, pasar Gotong-royong, dan pasar Cacaban. Pedagang pasar dipilih sebagai kelompok target dengan pendekatan informal karena sebagian besar pedagang tradisional adalah perempuan dan mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berjualan di pasar. Kehadiran relawan demokrasi segmen perempuan

⁹. Bagian Bina Partisipasi Masyarakat Biro Teknis dan Hupmas KPU, 2015, h 28

juga memberikan warna baru dalam kegiatan sosialisasi politik sebagai salah satu strategi yang diterapkan oleh KPU Kota Magelang dalam Pilkada tahun 2015. Bahkan berdasarkan buku Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jawa Tengah dari 21 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak di Jawa Tengah hanya KPU Kota Magelang yang membentuk relawan demokrasi khususnya segmen perempuan.¹⁰

3) Pemanfaatan Media Massa Lokal

Strategi untuk mengakses kelompok target juga dilakukan melalui pendekatan media, agar KPU Kota Magelang dalam menyampaikan informasi kepemiluan dan tahapan Pilkada tahun 2015 dapat lebih luas menjangkau pemilih perempuan di Kota Magelang secara massif tanpa terkecuali. KPU Kota Magelang membangun hubungan dengan media cetak lokal dan media elektronik lokal yang ada di Kota Magelang melalui kegiatan sebagai berikut:

Pertama, Rubrik Tanya Jawab “Masyarakat Bertanya Pemilu, KPU Menjawab” di Surat Kabar Harian Lokal. Rubrik tanya jawab di surat kabar harian lokal (SKHL) Magelang Ekspres merupakan tindak lanjut dari kegiatan “*media visit*” yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang. SKHL Magelang Ekspres dipilih sebagai media cetak untuk memuat rubrik tanya jawab tentang kepemiluan dan tahapan Pilkada tahun 2015 karena merupakan SKHL tertua dan mempunyai kapasitas edar paling tinggi di Kota Magelang. Berdasarkan *company profile* SKHL Magelang Ekspres merupakan SKHL pertama di Kota Magelang yang berdiri sejak tahun 2010, mulai tahun 2013 mempunyai kapasitas cetak sebanyak 18.000 eksemplar dengan wilayah edar di wilayah Magelang sebanyak 45,3%, Temanggung 15,3%, Wonosobo 17%, Purworejo 14,6%, dan Kebumen 7,8%. Rubrik tanya jawab KPU Kota Magelang diampu oleh KPU Kota Magelang yang menjawab pertanyaan dari masyarakat seputar kepemiluan dan tahapan Pilkada Tahun 2015, pertanyaan tersebut dikirimkan

¹⁰. Jawa Tengah, K. (2015). *Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jawa Tengah*. Semarang: KPU Jawa Tengah, h 25

ke redaksi SKHL Magelang Ekspres. Rubrik tanya jawab KPU Kota Magelang dengan masyarakat tersebut diberi judul “Masyarakat Bertanya Pemilu, KPU Menjawab”, yang dimuat satu kali dalam seminggu, yaitu pada hari Sabtu selama tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 berjalan. Rubrik tanya jawab “Masyarakat Bertanya Pemilu, KPU Menjawab” memang tidak secara spesifik membahas isu-isu yang berkaitan dengan pemilihan perempuan, namun animo perempuan di Kota Magelang untuk mengirimkan pertanyaan seputar pemilihan dan tahapan Pilkada tahun 2015 ke redaksi Magelang Ekspres cukup tinggi.

Kedua, Dialog Interaktif “Perempuan Cerdas Berdemokrasi” di Lembaga Penyiaran Publik Lokal. Selain melalui media cetak lokal, KPU Kota Magelang juga melakukan kerjasama dengan lembaga penyiaran publik lokal (LPPL) radio Magelang FM. Kerjasama dituangkan dengan perjanjian kerja sama antara KPU Kota Magelang dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Magelang Nomor 53/KB/KPU-Kota Mgl/2015 dan Nomor 270/417/280/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Sosialisasi Pemilu dan Penyelenggaraan Pilkada Kota Magelang Tahun 2015. Isi perjanjian tersebut berupa pelaksanaan sosialisasi oleh KPU Kota Magelang melalui kegiatan dialog interaktif yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Magelang melalui LPPL radio Magelang FM. Dialog interaktif dilaksanakan 1 kali dalam seminggu setiap hari Rabu pukul 16.30 sampai dengan 17.30 WIB selama tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 berlangsung. Adapun kelompok target sosialisasi politik dalam dialog interaktif tersebut terbagi menjadi dua segmen, yaitu untuk segmen pemilihan secara umum dilaksanakan pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga dengan tema “Pemilu Bermartabat”, sedangkan untuk segmen pemilihan perempuan pada hari Rabu minggu kedua dan keempat dengan tema “Perempuan Cerdas Berdemokrasi”. Pengisi acara dalam dialog interaktif tersebut adalah 5 orang

anggota KPU Kota Magelang secara bergantian setiap minggunya, dengan dipandu oleh pembawa acara dari LPPL radio Magelang FM.

Keaktifan pemilih perempuan dalam dialog interaktif melalui radio dengan materi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran pemilih perempuan untuk ikut serta dalam aktifitas yang berkaitan dengan penanaman nilai-nilai politik. Kemudian kesadaran tersebut terus dibangun dan ditingkatkan oleh KPU Kota Magelang dengan menayangkan berbagai iklan layanan masyarakat (ILM) di seluruh radio yang ada di Kota Magelang seperti CBS FM, UTM FM, Unima FM dan Tidar FM. ILM juga dibuat dalam bentuk visual yang dimuat di SKHL yang ada di Kota Magelang seperti Magelang Ekspres, Radar Kedu, Suara Merdeka perwakilan Kedu, Kedaulatan Rakyat perwakilan Magelang. ILM tersebut berisi ajakan kepada pemilih untuk aktif dalam memastikan bahwa namanya sudah terdaftar sebagai pemilih di PPS, ajakan untuk mencermati visi dan misi pasangan calon Kepala Daerah, ajakan untuk ikut serta mendaftar sebagai penyelenggara Pemilu, dan ajakan untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di TPS pada hari pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015.

b. *Strategi Defensif*

KPU Kota Magelang selain menggunakan strategi *ofensif* dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2015 melalui berbagai kegiatan-kegiatan baru, juga menggunakan strategi *defensif* yang dimaksudkan untuk mempertahankan pemilih perempuan yang selama ini sudah aktif dalam menggunakan hak pilihnya dan terlibat dalam rutinitas kegiatan sosialisasi politik bersama KPU Kota Magelang. Strategi defensif yang diterapkan oleh KPU Kota Magelang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dengan Kader Penggerak PKK Kota Magelang

Upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Magelang untuk “merawat” pemilih perempuan yang selama ini sudah aktif dalam menggunakan hak pilihnya dan terlibat dalam kegiatan sosialisasi politik bersama KPU Kota Magelang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan kader penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Magelang sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT). Kerjasama antara KPU Kota Magelang dengan penggerak PKK Kota Magelang dalam melaksanakan agenda sosialisasi politik dibidang pemilihan kepada pemilih perempuan sudah dilaksanakan sejak tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama nomor 02/KB/KPU-Kota Mgl/2012 dan 120/SKB/PKK-Kota/VI/2012 tanggal 23 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Bagi Pemilih Perempuan. Melalui kerjasama tersebut kegiatan sosialisasi pemilihan dimasukkan sebagai salah satu program kerja PKK Kota Magelang bidang Pembinaan Karakter dalam Keluarga (Bidang 1) yang dijalankan sejak tahun 2012.

Kerjasama dalam kegiatan sosialisasi pemilihan antara KPU Kota Magelang dengan kader penggerak PKK Kota Magelang yang sudah terbangun sejak tahun 2012, semakin diintensifkan pada saat berjalannya tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015, yaitu dengan menambah materi sosialisasi berupa tahapan Pilkada. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan dan memperkuat pemahaman tentang materi pemilihan dan tahapan Pilkada Kota Magelang bagi seluruh kader penggerak PKK di Kota Magelang. Kader penggerak PKK tingkat RT tersebut merupakan “ujung tombak” dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pemilihan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 kepada perempuan di lingkungannya yang tergabung dalam kelompok dasawisma. Kemudian anggota dasawisma yang telah mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut juga diharapkan dapat menyampaikan

informasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 tersebut kepada seluruh anggota keluarganya.

Informasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 juga disampaikan kepada seluruh anggota keluarga, baik kepada yang sudah ataupun yang belum memiliki hak pilih. Dengan begitu nilai-nilai politik tentang kepemiluan dan tahapan Pilkada mulai dikenalkan sejak dini, dimana keluarga merupakan struktur sosialisasi pertama yang dialami oleh seseorang pada umumnya. Keluarga juga mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan, seperti dalam pembuatan keputusan bersama. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik anggota keluarga, memberikan kecakapan untuk melakukan interaksi politik, dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam sistem politiknya.¹¹

Kerjasama dengan kader penggerak PKK Kota Magelang selain dapat mempertahankan dan memperkuat pemahaman tentang materi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 bagi seluruh kader penggerak PKK di Kota Magelang, juga bermanfaat bagi perempuan anggota Dasawisma itu sendiri dalam mendapatkan informasi kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015. Bahkan lebih jauh dari itu, nilai-nilai politik tentang kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 yang disampaikan oleh anggota Dasawisma kepada seluruh anggota keluarganya termasuk kepada anak-anak dapat memberikan manfaat terhadap pengenalan dan pembentukan nilai-nilai politik bagi generasi berikutnya. Pengenalan nilai-nilai politik tentang kepemiluan dan tahapan Pilkada Kota Magelang tahun 2015 akan tertanam lebih kuat kepada anak-anak apabila melihat praktek secara langsung, bagaimana orangtua atau lingkungan keluarganya yang sudah mempunyai hak pilih dalam berpartisipasi dalam Pilkada, seperti mendaftar sebagai pemilih, menonton debat pasangan calon Kepala Daerah di televisi,

¹¹ . Mas`oed & MacAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*, h 47

dan pada saat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara.

2) Publikasi Informasi Kepemiluan melalui *Website* KPU Kota Magelang

Website KPU Kota Magelang merupakan media jaringan berbasis internet sebagai salah satu sarana bagi KPU Kota Magelang untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan. *Website* KPU Kota Magelang menjadi rujukan oleh pengguna internet untuk mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan, khususnya tentang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tingkat Kota Magelang secara *online*. Secara garis besar informasi yang ditampilkan dalam *website* KPU Kota Magelang terbagi menjadi tiga bagian: *pertama*, berisi informasi tentang kepemiluan yang berisi sejarah KPU Kota Magelang, visi, dan misi KPU Kota Magelang, tugas dan kewenangan KPU Kota Magelang, pengertian Pemilu, sejarah Pemilu dan Pilkada, *kedua*, berisi tentang data berupa hasil penghitungan perolehan suara Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat Kota Magelang, hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kota Magelang, hasil penghitungan suara Pilkada Kota Magelang, dan produk hukum KPU Kota Magelang, *ketiga*, berisi aktifitas terbaru terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

KPU Kota Magelang telah mempromosikan *website* sebagai salah satu sarana untuk melakukan sosialisasi kepemiluan kepada masyarakat khususnya pengguna internet, hal tersebut dapat dilihat dari pencantuman alamat *website* KPU Kota Magelang <http://www.kpud-magelangkota.go.id/> ke dalam nomenklatur penulisan tata naskah dinas dan setiap bahan sosialisasi yang dibuat untuk disebarakan kepada masyarakat. Namun pemanfaatan *website* juga memiliki keterbatasan dalam hal interaksi dengan pengguna, penyampaian informasi hanya berlangsung satu arah. Meskipun KPU Kota Magelang telah mencantumkan alamat email resmi sebagai feedback dari

pengguna, namun interaksi tersebut berlangsung tertutup antara administrator *website* dan pengguna saja.

Untuk menciptakan keterbukaan, komunikasi yang efektif dan interaktif, serta saling menguntungkan antara KPU Kota Magelang dengan masyarakat dalam pelaksanaan sosialisasi kepemiluan, seharusnya KPU Kota Magelang memanfaatkan media sosial. Penggunaan media sosial dalam melakukan sosialisasi kepemiluan dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Pemanfaatan media sosial oleh KPU Kota Magelang akan mendukung pelaksanaan sosialisasi kepemiluan secara efektif dan efisien, dimana seluruh agenda sosialisasi kepemiluan bisa dengan mudah dan murah untuk disampaikan kepada publik.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa KPU Kota Magelang menerapkan dua strategi, yaitu strategi *ofensif* dan *defensif* dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi politik pada Pilkada tahun 2015. Strategi *ofensif* diterapkan melalui program-program baru yang selama ini belum pernah dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi politik bagi pemilih perempuan pada Pilkada sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pilkada. Sedangkan strategi *defensif* diterapkan melalui program yang selama ini sudah berjalan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi politik kepada pemilih perempuan, dengan tujuan untuk mempertahankan jumlah pemilih perempuan yang selama ini sudah aktif menggunakan hak pilihnya dan ikut terlibat dalam rutinitas kegiatan sosialisasi politik bersama KPU Kota Magelang kepada pemilih perempuan.

D. KESIMPULAN

KPU Kota Magelang menerapkan strategi *ofensif* dan *defensif* dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi politik pada Pilkada Kota Magelang tahun 2015. Strategi *ofensif* diterapkan melalui program-program baru yang selama ini belum pernah dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi pada Pilkada sebelumnya. Sedangkan strategi *defensif* diterapkan melalui program yang selama ini sudah berjalan dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi politik kepada pemilih perempuan. Penerapan strategi *ofensif* lebih mendominasi dalam peningkatan partisipasi pemilih perempuan pada Pilkada Kota Magelang tahun 2015. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya program baru yang dijalankan dan direspon positif oleh pemilih perempuan. Disamping itu, KPU Kota Magelang juga tidak mengabaikan strategi *defensif*, hal ini ditunjukkan dengan tetap terpeliharanya kerjasama dengan kader penggerak PKK Kota Magelang yang selama ini sudah terbangun dan ikut terlibat dalam rutinitas kegiatan sosialisasi politik bersama KPU Kota Magelang kepada pemilih perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, V., & Marzieh, K. (2017). Law Part of the Framework for Accountability in Policy Interpretation and Practice. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(1), 91-100. doi:10.26811/peuradeun.v5i1.122
- ACE Electoral Knowledge Network. (2011). *Encyclopedia Electoral Integrity: Guiding Principles of Electoral Integrity*. ACEproject.
- Almond, G. A., & Jr, G. B. (1978). *Comparative Politics, System, Process and Policy*. Boston: Little Brown and company.
- Beck, P. A. (1977). *The Role of Agents in Political Socialization "Handbook of Political Socialization"*. (S. A. Renshon, Ed.) New York: The Free Press.
- Bibler, S., Mohan, V., & Ryan, K. (2014). *Gender, Equality and EMB: Best Practice Guide*. Washington: IFES.
- Brady, H. E., Verba, S., & Schlozman, K. L. (1995). Beyond Ses: A Resource Model of Political Participation. *American Political Science Review*, 89, 271-294.
- Bryson, J. M. (2011). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (Fourth Edition ed.). San Francisco: Jossey-Bass

- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Catt, H., Ellis, A., Maley, M., Wall, A., & Wolf, P. (2014). *Electoral Management Design: Revised Edition*. Stockholm: International IDEA.
- dris, S., & Tabrani ZA. (2017). Realitas Konsep Pendidikan Humanisme dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 3(1), 96-113.
<https://doi.org/10.22373/je.v3i1.1420>
- Dudley, R. L., & Gitelson, A. R. (2002). Political Literacy, Civic Education, and Civic Engagement: A Return to Political Socialization? *Applied Developmental Science*, 6, 175-182.
- Geys, B. (2006). Explaining Voter Turnout: a Review of Aggregate-Level Research. *Electoral Studies*, 25, 637-663.
- Hooghe, M. (2004). Political Socialization and the Future of Politics. *Acta Politica*, 39, 331-341.
- Jawa Tengah, K. (2015). *Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2015 di Jawa Tengah*. Semarang: KPU Jawa Tengah.
- KPU. (2016). *Partisipasi Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2015*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum.
- Magelang, B. K. (2015). *Statistik Daerah Kota Magelang 2015*. Magelang: BPS Kota Magelang.
- Magelang, K. K. (2016). *Perjalanan Mewujudkan Pilkada Kota Magelang Tahun 2015 yang Bermartabat*. Magelang: KPU Kota Magelang.
- Mar'iyah, C. (2001). Transisi Demokrasi dan Konsolidasi: Peran Negara dan Peluang Gerakan Perempuan. *Jurnal Analisis Sosial*, 15.
- Mas'ood, M., & MacAndrews, C. (2011). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Murziqin, R. (2013a). Legal Reform Based on Federal Evidence Rules. *Journal of Islamic Law and Culture*, 12(1), 140-165
- Murziqin, R. (2013b). The Political Dynamics of Military Pensions in Indonesia. *Austrian Journal of Political Science*, 42(2), 145-160.
- Murziqin, R. (2014). Politics of Power and Its Influence on Elections in Indonesia. *Asian Journal of Political Science*, 22(2), 181-205.
- Murziqin, R. (2015). Government Authority in the Application of Islamic Sharia. *Journal of Islamic Law and Culture*, 13(2), 321-332
- Murziqin, R. (2016). Aceh Pasca MoU Helsinki. *Al-Ijtima`i-International Journal of Government and Social Science*. 2(1), 1-12.
- Murziqin, R. (2017). Context for Local Democracy and Problems Autonomy. *British Journal of Political Science*, 47(1), 19-30.
- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2016). The Importance of Local Parties and Incumbency to the Electoral in Aceh. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.

- Murziqin, R., & Tabrani ZA. (2017). A Consequence of Institutionalized Political Inequality. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 4(3), 231-242
- Murziqin, R., Tabrani ZA, & Zulfadli. (2012). Performative Strength in the Hierarchy of Power and Justice. *Journal of Islamic Law and Culture*, 10(2), 123-144.
- Nurhaeni, I. D. (2009). *Kebijakan Publik Pro Gender*. Surakarta: UNS Press.
- Pacheco, J. S. (2008). Political Socialization in Context: The Effect of Political Competition on Youth Voter Turnout. *Polit Behav*, 30, 415-436.
- Pamela, C., Villalobosl, L., & Peralta, N. (2017). Difference Cultural Structure and Behavior Students in Learning Process. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(1), 15-24.
doi:10.26811/peuradeun.v5i1.115
- Rush, M., & Althoff, P. (2013). *Pengantar Sosiologi Politik*. (K. Kartono, Trans.) Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanusi, S., Yusuf, R., & Jannah, M. (2017). The Understanding of Political Elites on the Consensus of Nation and State Life. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 5(2), 253-272.
doi:10.26811/peuradeun.v5i2.147
- Sapiro, V. (2004). "Not your parents" political socializatio, Introduction for a new generation. *Annual Review of Political Science*, 1-23.
- Scroder, P. (2010). *Strategi Politik* (Edisi Cetakan Ketiga ed.). (A. Agoesman, Trans.) Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit.
- Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Suparno, I., Ismunandar, K., & Rochimah, T. N. (2005). *Masih Dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat Partisipasi Politik Perempuan di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tabrani ZA & Murziqin, R. (2015). Political Education in Maturation Democracy in Indonesia. *British Journal of Political Science*, 45 (1), 215-226
- Tabrani ZA. (2011a). Dynamics of Political System of Education Indonesia. *International Journal of Democracy*, 17(2), 99-113.
- Tabrani ZA. (2011b). Nalar Agama dan Negara dalam Perspektif Pendidikan Islam. (Suatu Telaah Sosio-Politik Pendidikan Indonesia). *Millah Jurnal Studi Agama*, 10(2), 395-410.
- Walidin, W., Idris, S., & Tabrani ZA. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.